

# Implementation of Village Information System to Increase Public Information Disclosure in Kendalpecabean Village Candi District Sidoarjo Regency

## Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Cantika Alif Putri<sup>1)</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [cantikaalifputri0@gmail.com](mailto:cantikaalifputri0@gmail.com), [ilmiusrotin@umsida.ac.id](mailto:ilmiusrotin@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the implementation of the Village Information System (SID) in improving public information disclosure in Kendalpecabean Village, Candi District, Sidoarjo Regency. This assessment uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that SID contributes significantly to improving transparency, public services and efficiency of village administration. However, there are still several obstacles such as limited human resources who have not fully understood due to the lack of assistance and training from related agencies regarding the management of this information system. In addition, there are still limitations in providing complete information related to village information, village program information, information on activities and village performance. Another problem is that some menus on the SID website experience errors or cannot be accessed when opened, thus hindering the community in obtaining the information they need. Policy implementation is analyzed using Eward III theory which includes indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research findings show that although the infrastructure and commitment of implementers are supportive, training in preparing SOPs and efforts to increase public trust in SID still need to be improved. This study emphasizes the importance of strengthening capacity and support from local governments so that the implementation of SID is increasingly optimal in village governance.*

**Keywords** - Village Information System, Public Information Disclosure, E-Government, Policy Implementation, Kendal Pencabean Village

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penilaian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SID berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, pelayanan publik dan efisiensi administrasi desa. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami karena kurangnya pendampingan dan pelatihan dari dinas terkait mengenai pengelolaan sistem informasi ini. Selain itu masih ditemukan keterbatasan dalam penyediaan informasi yang lengkap terkait informasi desa, informasi program desa, informasi kegiatan dan kinerja desa. Permasalahan lainnya yaitu adanya beberapa menu pada website SID yang mengalami error atau tidak dapat diakses ketika dibuka, sehingga menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori Eward III yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Temuan penelitian menunjukkan meskipun infrastruktur dan komitmen pelaksana sudah mendukung, pelatihan penyusunan SOP serta upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap SID masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah daerah agar penerapan SID semakin optimal dalam tata kelola desa.*

**Kata Kunci** - Sistem Informasi Desa, Keterbukaan Informasi Publik, E- Government, Implementasi Kebijakan, Desa kendal Pencabean

## I. PENDAHULUAN

Dokumen sebagai entitas yang memiliki otonomi, desa dapat mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan layanan publik di wilayah administratifnya. Pelayanan tersebut mencakup penyediaan barang dan jasa publik serta pelayanan administratif [1]. Pelayanan publik berbentuk barang mencakup

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

penyediaan sarana dan prasarana desa, misalnya pembangunan jalan dan jembatan. Adapun pelayanan publik berbasis jasa meliputi berbagai program pemerintah desa, seperti pendampingan bagi UMKM serta penyediaan layanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu. Sementara itu, pelayanan administratif merupakan bentuk layanan wajib yang diselenggarakan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan melindungi individu, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Sebagai penyelenggara layanan, pemerintah desa harus mempersiapkan berbagai aspek untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang meliputi penyediaan fasilitas pelayanan publik, penempatan SDM yang kompeten, serta penyusunan dan penetapan standar pelayanan [2].

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana diatur dalam Pasal 86, pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan pedesaan dengan mengalokasikan dana desa sebesar 10% dari APBN, sehingga pemerintah mewajibkan setiap desa untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID)[3]. SID adalah sebuah platform yang digunakan untuk mengelola berbagai data yang ada di desa[4]. SID memuat informasi terkait data penduduk, layanan publik, produk hukum dan informasi tentang kegiatan dan program desa yang dikelola oleh pemerintah desa[5]. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) meningkatkan efisiensi administrasi desa melalui integrasi data penduduk, keuangan dan pelayanan secara elektronik. Hal ini meminimalkan proses manual yang lambat dan rawan kesalahan, sehingga pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat dan efisien dalam penggunaan sumber daya[6].

Pembuatan website desa (SID) menjadi langkah awal dalam mengembangkan *e-government*, dengan tujuan memberikan akses informasi dan layanan kantor pemerintah desa kepada masyarakat. Penerapan sistem *e-government* di Indonesia diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan *E-Government*. Impres tersebut menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah wajib merancang, mengembangkan dan menerapkan konsep *e-government* di masing-masing instansi, terutama dalam hal penyediaan informasi kepada publik[7]. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penerapan tata kelola pemerintahan desa yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. *E-government* adalah sistem yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan. Kehadiran *e-government* diharapkan dapat semakin memperkuat organisasi dan manajemen pemerintahan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi[8].

Perkembangan era demokrasi menuntut adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada awal pelaksanaannya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, juga dikenal sebagai *good governance*[9]. Penerapan prinsip *good governance* yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diwujudkan dalam pelayanan publik khususnya di bidang administrasi, yang menunjukkan perkembangan era globalisasi dan digitalisasi melalui penerapan teknologi canggih dalam tata kelola pemerintahan. Sejak tahun 2010, setiap instansi pemerintahan dan organisasi publik diwajibkan menyediakan situs web resmi sebagai bentuk implementasi *good governance*.

Keterbukaan informasi publik semakin digalakkan setiap tahun seiring dengan perkembangannya. Hal utama untuk mewujudkan negara yang terbuka adalah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Semakin terbuka sebuah badan publik, maka badan publik tersebut akan dinilai semakin baik pertanggungjawabannya[10]. Banyak lembaga pemerintah di tingkat pusat yang memiliki website resmi dengan domain .go.id. Keterbukaan informasi publik tidak hanya diterapkan dipemerintahan pusat, tetapi juga diterapkan pada lingkup daerah, baik ditingkat provinsi, kabupaten atau kota. Implementasi keterbukaan informasi publik meluas hingga ke unit pemerintahan terendah yakni desa, dengan tujuan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, penerapan keterbukaan informasi publik mulai dilaksanakan pada level desa sejak tahun 2014 yang ditegaskan dalam pasal 26 ayat (4) huruf f disebutkan bahwa kepala desa wajib melaksanakan prinsip pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta pada huruf p menegaskan kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat desa. Selain itu, Pasal 27 huruf d mengatur bahwa kepala desa wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, yang dalam praktiknya dapat didukung melalui pemanfaatan SID sebagai media penyebaran informasi yang efektif dan mudah diakses.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) menjadi langkah penting dalam mendukung terwujudnya *smart city*. Melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), proses pelayanan publik dapat diselenggarakan secara lebih efisien, tepat sasaran serta transparan. Konsep *smart city* ini bertujuan menciptakan interaksi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga aspirasi dan kebutuhan warga dapat terpenuhi melalui pelayanan yang efisien, adaptif dan saling terhubung[11]. Dalam rangka mewujudkan *smart city*, Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 yang mengatur tata kelola teknologi informasi dan

komunikasi sebagai bagian dari implementasi *e-government*. Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi merupakan salah satu daerah di Kabupaten Sidoarjo yang telah menerapkan Peraturan Bupati tersebut dengan mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID). Sistem ini dapat diakses melalui <https://kendalpecabean-candi.desa.id> untuk mempermudah pelayanan dan penyebaran informasi secara efektif dan efisien.

SID tidak hanya diterapkan di Kabupaten Sidoarjo, tetapi juga merupakan program nasional milik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa berbasis digital. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data desa serta keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pada tingkat daerah, implementasi SID di Kabupaten Sidoarjo terintegrasi dengan kebijakan serta sistem yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo. Dinas ini memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, pengembangan serta pengawasan terhadap pelaksanaan SID di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, termasuk dalam mendukung proses digitalisasi desa secara berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan SID juga menunjukkan integritas dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam penyediaan infrastruktur jaringan internet serta dukungan teknis terkait pengelolaan website desa, dimana Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai pelaksana teknis yang menangani aspek infrastruktur dan dukungan sistem.



**Gambar 1.** Halaman Depan Sistem Informasi Desa (SID) Desa Kendalpecabean

Sumber: <https://kendalpecabean-candi.desa.id>

Berdasarkan Gambar 1, halaman utama website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, menampilkan berbagai menu dan sub menu didalamnya. Pada bagian utama terdapat menu navigasi yang meliputi profil desa, pemerintahan desa, lembaga masyarakat, data desa, kontak, regulasi dan lapak. Menu profil desa menyajikan informasi umum seperti sejarah, visi dan misi, kondisi geografis dan demografis desa. Menu pemerintahan desa berfungsi untuk menampilkan struktur organisasi dan data perangkat desa, sedangkan menu lembaga masyarakat memuat informasi terkait lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna. Selanjutnya, menu data desa menyediakan data statistik kependudukan dan potensi desa, sementara menu kontak dan regulasi masing-masing berisi informasi kontak resmi desa serta dokumen peraturan yang berlaku. Adapun menu lapak digunakan sebagai sarana promosi dan pemasaran produk unggulan masyarakat desa.

Selain menu navigasi, *website* SID juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan pengguna dalam menemukan informasi secara cepat. Pada bagian halaman utama terdapat berbagai fitur layanan yang disajikan dalam bentuk ikon, antara lain peta desa yang menampilkan wilayah administratif desa, produk hukum yang berisi dokumen peraturan desa, serta informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat. Terdapat pula fitur lapak desa yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, arsip berita yang memuat informasi kegiatan desa, serta album galeri yang menyajikan dokumentasi kegiatan desa. Fitur pengaduan disediakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan, sedangkan fitur pembangunan berfungsi untuk memberikan informasi terkait kegiatan pembangunan desa. Selain itu, terdapat fitur SOTK yang menampilkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Pada bagian bawah halaman, tersedia kolom informasi terkini yang berisi berita atau pengumuman terbaru, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang aktual. Secara keseluruhan, fitur-fitur dalam website SID tersebut berperan penting dalam meningkatkan transparansi, efektivitas pelayanan publik, serta mendukung proses digitalisasi pemerintahan desa.

**Tabel 1.** Data Pengunjung *Website* SID Desa Kendalpecabean Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Pengunjung <i>Website</i> SID
2024	63.607
2023	47.236
2022	2.674

*Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025*

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kunjungan pada *website* SID di Desa Kendalpecabean menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan tercatat sebanyak 63.607 kali. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat 47.236 kunjungan. Sementara itu, pada tahun 2022 jumlah kunjungan masih tergolong rendah yaitu hanya mencapai 2.674 kunjungan. Terlihat secara jelas bahwa Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean memegang peran penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peningkatan jumlah pengunjung mencerminkan bahwa SID berperan sebagai pilar utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di desa.

Desa Kendalpecabean yang terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini karena salah satu desa yang telah menerapkan SID secara aktif melalui *website* resmi yang memuat berbagai informasi publik desa. Namun demikian, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala pada aspek pemahaman aparatur desa dalam mengelola Sistem Informasi Desa (SID), karena kurangnya pendampingan dan pelatihan dari dinas terkait mengenai pengelolaan sistem informasi ini. Selain itu masih ditemukan keterbatasan dalam penyediaan informasi yang lengkap terkait informasi desa, informasi program desa, informasi kegiatan dan kinerja desa. Permasalahan lainnya yaitu adanya beberapa menu pada *website* SID yang mengalami error atau tidak dapat diakses ketika dibuka, sehingga menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jika kendala tersebut tidak segera diatasi, maka potensi besar yang ditawarkan oleh transformasi digital dalam pemerintahan desa akan sulit untuk diwujudkan[12].

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh George C.Edward III, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator yaitu komunikasi berkaitan dengan kejelasan informasi kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana pendukung. Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas dan prosedur yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Keempat indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana SID telah diimplementasikan secara efektif serta faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaannya.

Permasalahan yang muncul di Pemerintah Desa Kendalpecabean sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdi Mutazir, Toto Kushartono dan Bayu Septiansyah pada tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang”. Dalam implementasi SID di Desa Warung Bumbu hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya sosialisasi terkait SID oleh pemerintah Desa Warung Bumbu, serta ketidakjelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, tidak semua petugas memiliki pemahaman yang memadai tentang SID akibat keterbatasan usia dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sistem[13].

Kedua, pada tahun 2024 Nur Amiril dan Ilmi Usrotin Choiriyah melakukan penelitian yang berjudul “Impelementasi E-Government Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Studi di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo”. Dalam implementasi SID di Desa Sugihwaras kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemkab terkait pengelolaan SID. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman bagi pengelola *website* mengenai mekanisme penggunaan SID[14].

Yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Laila Istiqhfarah, Irma Irawati Puspaningrum, dan Ach. Andiriyanto pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan SIDEKa Dalam Percepatan Kemandirian Desa di Desa Pamolokan Kabupaten Sumenep”. Dalam penelitian ini hambatan yang dihadapi adalah Desa Pamalokantelah mengimplementasikan teknologi yang diberi nama SIDEKa dalam pelaksanaannya

dikembangkan dalam bentuk website desa. Namun sebagian besar masyarakat tidak memahami karena kurangnya sosialisasi yang mendalam kepada lapisan masyarakat mengenai manfaat website desa. Selain itu, struktur birokrasi di desa Pamolokan dalam melaksanakan SIDeKa tidak memiliki SOP[15].

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan kepala desa, bendahara desa dan masyarakat pengakses SID, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena dilapangan, wawancara merupakan percakapan langsung yang dilaksanakan untuk memperkuat data sekunder dalam penelitian dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang mendukung analisis implementasi SID. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang memahami secara langsung objek penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa sebagai penanggung jawab, bendahara desa sebagai admin SID dan masyarakat pengunjung website sebagai pengguna informasi yang disediakan oleh SID. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam langkah pengumpulan data, peneliti mengumpulkan informasi melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi SID di Desa Kendalpecabean. Data yang telah dikumpulkan kemudia direduksi dengan menyeleksi dan menfokuskan pada informasi penting sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk mempermudah proses interpretasi. Pada tahap terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang untuk menghasilkan temuan yang konsisten, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, Pemerintah Desa Kendalpecabean tengah menerapkan Sistem Informasi Desa, yaitu penerapan teknologi berbasis komputer yang digunakan untuk mengatur dan mengelola data serta aktivitas administrasi di kantor desa. Peran penting sistem ini terlihat dalam mendukung aktivitas pemerintahan desa, seperti pengelolaan aset, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Keunggulan utama dari sistem ini adalah mendorong terciptanya kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di kantor desa. Di sisi lain, masyarakat memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai desa mereka. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian terkait Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Kendalpecabean.

### A. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang mencakup ide, keterampilan, peraturan dan berbagai aspek lainnya melalui sarana tertentu. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, aspek komunikasi yang perlu diperhatikan meliputi cara penyampaian informasi dan tingkat kejelasan pesan yang disampaikan. Menurut George C. Erward III sebagaimana dikutip oleh Deddy Mulyadi (2018:68), menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan para pelaksana memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan perlu ditransmisikan secara tepat kepada kelompok sasaran (*target group*) agar dapat meminimalisir terjadinya distorsi dalam pelaksanaan. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan harus bersifat jelas, akurat dan konsisten sehingga para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang tepat mengenai tindakan yang harus dilakukan.

Dalam implementasi SID di Desa Kendalpecabean yang menjadi kelompok sasaran atau *target group* adalah masyarakat. Bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait tidak tersampaikan dengan jelas karena pelaksanaannya yang terbatas dan tidak berkelanjutan. Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang bertempat di Balai Desa Kendalpecabean mengenai adanya *website* SID tersampaikan dengan jelas karena bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain melalui kegiatan sosialisasi, proses komunikasi juga dilakukan melalui penyebaran informasi secara tidak langsung. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan grup komunikasi grup *whatsapp* RT, RW, serta melalui organisasi kepemudaan yaitu karang taruna. Gambar di bawah ini menunjukkan adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sebagai upaya penyampaian informasi terkait pemanfaatan SID.



**Gambar 2.** Dokumentasi Sosialisasi SID Kepada Masyarakat

*Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025*

Gambar tersebut menunjukkan kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Desa (SID) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kendalpecabean di Balai Desa Kendalpecabean. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa (admin SID) sebagai narasumber serta masyarakat sebagai penerima informasi terkait penggunaan SID. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai adanya *website* SID. Dalam pelaksanaannya perangkat desa menyampaikan materi dengan menggunakan layar proyektor sehingga masyarakat dapat memahami informasi yang diberikan secara jelas. Kegiatan ini dilaksanakan menjelang pemilihan kepala desa, dimana momentum tersebut dimanfaatkan sekaligus untuk mensosialisasikan pentingnya data atau informasi dalam SID kepada masyarakat, tetapi sosialisasi tersebut masih cenderung bersifat satu arah sehingga pemahaman masyarakat belum sepenuhnya optimal. Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 April 2025, Moch. Erkam selaku salah satu peserta sosialisasi mengatakan:

*“Penjelasan yang diberikan oleh perangkat desa cukup mudah difahami, terutama bagi kalangan anak muda yang sudah terbiasa menggunakan teknologi internet, namun bagi sebagian masyarakat yang lebih tua masih mengalami kebingungan dalam memahami cara mengakses dan menggunakan website SID”.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pada dasarnya dapat dipahami oleh masyarakat, khususnya oleh generasi muda yang lebih familiar dengan penggunaan teknologi digital. Akan tetapi, bagi masyarakat yang berusia lebih tua masih terdapat kendala dalam memahami penggunaan website SID karena keterbatasan pengetahuan terhadap teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses komunikasi telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, namun tingkat pemahaman masyarakat masih berbeda-beda sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan pendampingan yang berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, temuan penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Muhammad Hamdi Muntazir dkk (2024) yang menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi SID masih menghadapi kendala pada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pada kedua penelitian tersebut, sosialisasi dari dinas terkait yang terbatas menjadi salah satu hambatan dalam penyampaian informasi. Selain itu, terdapat perbedaan pada tingkat kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa informasi yang disampaikan masih kurang jelas sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami SID, sedangkan di Desa Kendalpecabean informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa relatif lebih mudah dipahami serta didukung oleh penyebaran informasi melalui pengurus RT, RW dan karang taruna kepada masyarakat.

## **B. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan elemen penting untuk mendukung operasional suatu organisasi. Ketersediaan sumber daya serta penempatannya dalam pelaksanaan kebijakan memiliki peran yang sangat penting, sebab kekurangan atau tidak optimalnya sumber daya bisa mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut George C. Erward III yang dikutip oleh Deddy Mulyadi (2018:68), meskipun suatu kebijakan sudah dikomunikasikan secara

jasas, implementasinya tetap tidak akan berjalan secara efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni dimaknai sebagai kapasitas dan kualitas individu yang menjalankan tugas dalam implementasi kebijakan publik. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada adanya staf yang berkompeten. Jika para pelaksana kebijakan tidak berkompeten atau jumlahnya tidak mencukupi, maka efektivitas implementasi kebijakan bisa terhambat.

**Tabel 2.** Daftar Pengelola *Website* SID Desa Kendalpecabean

NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
Mochamad Junaidi	Kaur Perencanaan	S1
Khusen	Kasi Pemerintahan	SMA

*Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025*

Berdasarkan data yang tertera ditabel 2, dapat dilihat bahwa pengelolaan *website* SID di Desa Kendalpecabean dilakukan oleh dua orang perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan SID memiliki kemampuan yang beragam. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendampingan dari dinas terkait sehingga aparatur desa harus berupaya meningkatkan pemahaman secara mandiri melalui berbagai sumber internet seperti *youtube*. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam mengelola SID belum sepenuhnya merata, dimana hanya satu operator yang memiliki pemahaman secara mendalam. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 April 2025, Mochamad Junaidi selaku Operator SID mengungkapkan:

*“Operator SID di Desa Kendalpecabean terdiri dari dua orang, namun hanya satu yang sepenuhnya memahami pengelolaan dan perawatan SID, selain itu juga bertugas sebagai admin utama SID didesa ini. Satu operator lainnya lebih fokus pada penginputan data karena pemahamannya yang terbatas”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan SID di Desa Kendalpecabean operator yang memiliki pemahaman lebih mendalam bertanggung jawab sebagai admin utama yang melakukan pembaruan informasi, mengelola sistem serta perawatan *website* SID. Sementara itu, operator lainnya lebih banyak membantu dalam proses penginputan data yang berkaitan dengan administrasi desa. Pembagian tugas tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing operator dalam mengoperasikan sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan SID telah berjalan, namun optimalisasi pengelolaan sistem masih bergantung pada satu operator sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan masih diperlukan agar pengelolaan SID dapat dilakukan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Selain sumber daya manusia, fasilitas atau sarana penunjang juga dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan SID di Desa Kendalpecabean yakni perangkat teknologi untuk mempermudah dan mempercepat penyelenggaraan pemerintah desa, dalam hal ini fasilitas atau sarana penunjang seperti komputer dan wifi sudah memadai. Sumber daya finansial (anggaran) juga merupakan kekuatan dalam mendukung pelaksanaan SID di Desa Kendalpecabean. Dalam hal ini sumber anggaran didapatkan dari dana desa. Pemerintah Desa Kendalpecabean juga menganggarkan dana setiap tahunnya untuk pemeliharaan dan memperpanjang layanan hosting dan domain yang berkaitan dengan *website* SID milik desa. Tabel dibawah ini merinci anggaran setiap tahunnya yang dialokasikan untuk pengelolaan SID.

**Tabel 3.** Anggaran *Website* SID Desa Kendalpecabean

Tahun	Anggaran	Sumber Dana
2024	Rp. 2.000.000,-	Dana Desa
2023	Rp. 3.000.000,-	Dana Desa
2022	Rp. 3.000.000,-	Dana Desa

*Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025*

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan SID di Desa Kendalpecabean mengalami perbedaan setiap tahunnya. Perbedaan jumlah anggaran tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan operasional pengelolaan *website* SID pada masing-masing tahun anggaran. Pada tahun 2022 dan 2023, pemerintah desa mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembaharuan sistem, pengembangan fitur maupun penyesuaian layanan hosting dan domain agar *website* dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah anggaran yang dialokasikan relatif lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya karena kebutuhan pengelolaan SID lebih difokuskan pada pemeliharaan rutin saja, seperti perpanjangan layanan hosting dan domain tanpa adanya pembaruan sistem yang signifikan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya berbeda.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, pada indikator sumber daya hasil penelitian di Desa Kendalpecabean menunjukkan bahwa sumber daya manusia masih terbatas, dimana hanya satu operator yang benar-benar memahami pengelolaan SID, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan dari dinas terkait. Temuan ini memiliki persamaan

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Hamdi Muntazir dkk (2024), yang juga menunjukkan adanya keterbatasan kualitas SDM dalam mengelola SID, Namun, terdapat perbedaan yaitu di Desa Kendalpecabean sarana prasarana dan anggaran sudah cukup memadai, sedangkan pada penelitian terdahulu permasalahan tidak hanya pada sumber daya manusia tetapi juga pada keterbatasan pemeliharaan sarana pendukung.

### C. Disposisi

Sikap para pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan antara lain adalah kejujuran serta komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan SID komitmen dari kepala Desa Kendalpecabean dalam mengimplementasikan SID diwujudkan dengan mengalokasikan sebagian anggaran dana desa untuk pelaksanaan SID pada setiap tahunnya.

*“Setiap tahun kami berusaha mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung operasional SID. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang operasional dan pengelolaan sistem, sehingga informasi terkait data dan kegiatan desa dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat dan terbuka”.*

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 April 2025 dengan Wahyu Istanto Dwi Putro selaku kepala Desa Kendalpecabean tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen dalam mendukung implementasi SID. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan pengalokasian sebagian anggaran dana desa setiap tahunnya untuk mendukung pelaksanaan SID. Dukungan anggaran ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah desa dalam memastikan bahwa sistem tersebut dapat terus berjalan dan dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih terbuka dan transparan.

Menurut George C. Edward III dalam Deddy Mulyadi (2018:68), disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dan kejujuran. Apabila implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik terhadap kebijakan, maka dia dapat melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Tetapi, apabila disposisi implementor kurang baik, maka proses pelaksanaan kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dengan demikian, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pada pelaksanaan SID di Desa Kendalpecabean operator desa menjunjung tinggi kejujuran. Hal ini dapat dilihat dari peran operator desa yang sekaligus sebagai penyusun berita dalam memberikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan serta tidak melakukan manipulasi terhadap data yang ada. Komitmen yang tinggi dari para pelaksana kebijakan akan mendorong mereka untuk menjalankan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab dengan penuh semangat serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 April 2025, Mochammad Junaidi selaku operator SID mengungkapkan:

*“Komitmen awal operator SID untuk menjaga agar data tidak hilang dan dapat berkelanjutan sesuai fungsinya. Biasanya terkait updating data dilakukan pada Hari Minggu atau waktu senggang, berupa pengecekan data penginputan kegiatan yang sudah dilakukan oleh desa yang kemudian diunggah sebagai artikel berita”.*

Hasil wawancara dengan operator SID Desa Kendalpecabean menunjukkan adanya komitmen dari pelaksana kebijakan dalam menjaga keberlangsungan serta pengelolaan data pada SID. Operator menyampaikan bahwa komitmen tersebut diwujudkan dengan upaya menjaga agar data yang telah diinput ke dalam sistem tidak hilang dan berkelanjutan. Selain itu, operator juga melakukan pembaruan data secara berkala, khususnya pada waktu senggang dengan melakukan pengecekan terhadap data yang telah diinput, kemudian mengunggahnya dalam bentuk artikel berita pada *website* SID. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dalam mendukung keberlangsungan implementasi SID di Desa Kendalpecabean. Namun demikian, meskipun operator telah berupaya melakukan pengelolaan dan pembaruan data secara berkala, pada praktiknya masih ditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan SID. Ketika *website* diakses, ada beberapa informasi yang ditampilkan kurang lengkap dan terbaru. Selain itu, masih terdapat beberapa fitur pada *website* yang tidak dapat diakses karena mengalami kesalahan sistem (*error*). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan sudah cukup baik, namun optimalisasi pemanfaatan SID masih memerlukan dukungan tambahan, terutama dalam bentuk pelatihan dan pendampingan jiteknis dari dinas terkait.

Sikap para pelaksana juga mencerminkan sejauh mana dukungan yang diberikan oleh struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang didalamnya serta hubungan dan komunikasi yang terjalin dilingkungan internal organisasi dalam menjalankan suatu kebijakan. Selain itu, dukungan dari pihak luar maupun kelompok sasaran juga turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya berbagai bentuk dukungan tersebut, pelaksanaan kebijakan akan sulit berjalan optimal. Namun pada kenyataannya, dinas terkait belum memberikan dukungan yang optimal terhadap implementasi SID di Desa Kendalpecabean. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pendampingan

dan minimnya pelatihan yang diberikan kepada pihak desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan SID. Padahal, keberadaan SID sangat mendukung penerapan *e-government* sebagai upaya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, kurangnya dukungan dari dinas terkait menyebabkan operator desa kurang memiliki motivasi untuk melakukan pembaruan informasi pada *website* SID. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh operator desa terkait pengelolaan dan pemanfaatan *website* tersebut. Selain itu, pelaksanaan SID juga memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang sangat penting, karena masyarakat diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin berbasis teknologi. Dengan demikian, masyarakat dapat turut berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan *website* sebagai sarana untuk mendukung kemajuan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, pada indikator disposisi hasil penelitian di Desa Kendalpecabean menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang cukup baik, yang ditunjukkan melalui pengalokasian anggaran serta upaya operator dalam menjaga dan memperbarui data SID secara mandiri. Temuan ini memiliki persamaan dengan penelitian Nur Amiril (2024) yang sama-sama menunjukkan adanya sikap positif dan dukungan dari aparat desa dalam pelaksanaan SID. Namun, terdapat perbedaan, yaitu di Desa Kendalpecabean komitmen pelaksana sudah diwujudkan dalam tindakan nyata seperti pembaruan data secara berkala, sedangkan pada penelitian tersebut disposisi pelaksana masih belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman.

#### D. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan harus memiliki struktur yang jelas, karena struktur memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Kejelasan prosedur operasional standar (SOP) akan mempermudah aparat dalam melaksanakan suatu kebijakan. Struktur organisasi dapat dikatakan baik dan jelas apabila memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Menurut George C Edward II dalam Mulyadi (2018:68), bahwa Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek penting dalam setiap organisasi adalah adanya prosedur operasional yang standar. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dengan adanya SOP yang jelas, setiap pelaksana kebijakan dapat memahami tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya dalam menjalankan kebijakan secara terarah dan terkoordinasi.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Penukung		Ket
		Pemohon Masyarakat	Operator SID	Kepala Desa/ Sekdes	Sekdes & Operator SID	Waktu	Output	
1.	Masyarakat mengajukan permintaan layanan atau data melalui SID (langsung/online)	mulai				Setiap saat pada hari kerja	Formulir permintaan atau data yang diajukan	
2.	Verifikasi permintaan dan pencatatan oleh operator SID ke sistem					Maks. 1 hari kerja	Permintaan tercatat dalam sistem	
3.	Penyusunan dokumen melalui modul SID (misal: surat keterangan, data kependudukan, laporan kegiatan)					1-2 hari kerja tergantung jenis layanan	Dokumen digital siap validasi	
4.	Validasi dan tanda tangan digital/mamul oleh Kepala Desa atau Sekdes					Di hari yang sama /maksimal 1 hari kerja	Dokumen resmi yang sah	
5.	Penyerahan hasil layanan ke pemohon (langsung/email/WA)					Maksimal 2 hari kerja	Dokumen diterima pemohon	
6.	Penyimpanan arsip digital ke sistem dan backup ke cloud lokal					Harian	Dokumen terdokumentasi dan aman	
7.	Evaluasi mingguan & pelaporan berkala kinerja SID					Tiap minggu/bulan	Laporan evaluasi layanan SID	

**Gambar 3.** SOP SID Desa Kendalpecabean

Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025

Gambar diatas menunjukkan alur Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan SID. di Desa Kendalpecabean. SOP tersebut menggambarkan tahapan kerja yang harus dilakukan oleh aparat desa dalam mengelola dan memperbarui informasi pada *website* SID secara sistematis. Proses tersebut umumnya dimulai dari pengumpulan data atau informasi kegiatan desa, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi oleh pihak yang bertanggung jawab sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem oleh operator. Setelah data dimasukkan ke dalam *website*, informasi selanjutnya dipublikasikan sehingga dapat diakses oleh masyarakat melalui *website* desa. Adanya SOP ini berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparat desa agar pelaksanaan pengelolaan informasi pada SID dapat berjalan secara terarah, terstruktur dan sesuai dengan tugas masing-masing pelaksana. Dengan adanya prosedur yang jelas, setiap perangkat desa dapat memahami perannya dalam proses pengelolaan informasi desa sehingga meminimalkan kesalahan dalam penginputan maupun penyampaian informasi kepada masyarakat. Jika dikaitkan

dengan teori George C. Edward III, struktur birokrasi yang baik tidak hanya ditandai dengan adanya SOP sebagai pedoman kerja, tetapi juga dengan pelaksanaan prosedur tersebut secara konsisten oleh para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator struktur birokrasi dalam implementasi SID di Desa Kendalpecabean menunjukkan bahwa keberadaan prosedur operasional standar (SOP) menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan informasi desa melalui *website* SID. Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laila Istiqhfarah, Irma Irawati Puspaningrum dan Ach. Andriyanto (2021) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi desa. Namun pada penelitian tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan SIDeKa masih mengalami kendala karena belum adanya SOP yang jelas. Sementara itu, pada penelitian di Desa Kendalpecabean telah terdapat pedoman kerja dalam pengelolaan SID, meskipun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar implemetasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

## VII. SIMPULAN

Pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean berdasarkan indikator implementasi kebijakan menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pada indikator komunikasi, pemerintah desa telah melakukan upaya transmisi informasi melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat serta penyebaran informasi melalui media komunikasi seperti grup WhatsApp dan organisasi masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi masih belum optimal karena bersifat terbatas dan belum berkelanjutan, sehingga pemahaman masyarakat terhadap penggunaan SID masih belum merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi. Pada indikator sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana seperti komputer, jaringan internet, serta dukungan anggaran dari dana desa telah memadai. Akan tetapi, sumber daya manusia masih menjadi kendala utama, dimana pengelolaan SID masih bergantung pada satu operator yang memiliki pemahaman lebih mendalam. Kurangnya pelatihan dan pendampingan dari dinas terkait menyebabkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola SID belum merata dan optimal. Selanjutnya, pada indikator disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang cukup baik dalam mendukung keberlangsungan SID. Hal ini terlihat dari upaya operator dalam melakukan pembaruan data secara berkala serta menjaga keakuratan informasi yang disajikan kepada masyarakat. Meskipun demikian, keterbatasan pengetahuan teknis dan minimnya dukungan eksternal masih menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi sistem. Pada indikator struktur birokrasi, Desa Kendalpecabean telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pengelolaan SID, serta pembagian tugas yang jelas antar perangkat desa sesuai dengan kompetensi masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya masih perlu peningkatan konsistensi agar pengelolaan informasi dapat berjalan lebih efektif dan sistematis. Secara keseluruhan, implementasi SID di Desa Kendalpecabean telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik serta pelayanan administrasi desa. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta perbaikan sistem teknis agar SID dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada Bapak Mochamad Junaidi atas partisipasi aktif dan kontribusi dalam memberikan data serta informasi yang relevan terkait penggunaan *website* Sistem Informasi Desa (SID).

## REFERENSI

- [1] M. Jeddawi, A. Rahman, And M. Nawawi, "Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol. 3, No. 1, Jul. 2018, Doi: 10.33701/Jipsk.V3i1.301.
- [2] S. Sakir, A. S. Rahmatullah, And R. Sarofah, "Optimalisasi Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dusun Temanggung, Jetis, Saptosari, Gunungkidul," *Warta Lpm*, Vol. 21, No. 2, Pp. 1–5, Mar. 2019, Doi: 10.23917/Warta.V21i2.6567.
- [3] Lisnawati And S. Lestari, "Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh Besar," *Publisa: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 4, 2019.

- [4] M. Adam And N. Nurhalimah, "Analisis Pengembangan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar," *Alhaqiqa: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- [5] Millah Nashrul, Miswanto, And Alfiniyah Cicik, "Pembuatan Sistem Informasi Desa (Sid) Untuk Menunjang Pelayanan Di Desa Klangon, Madiun," *Pengabdianmu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 8, No. 1, Jan. 2023.
- [6] E. Mardinata, T. D. Cahyono, And R. Muhammad Rizqi, "Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (Sid): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, Pp. 73–81, Jun. 2023, Doi: 10.38043/Parta.V4i1.4402.
- [7] C. Yuono, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu," *Jurnal Pustaka Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, Pp. 418–431, Sep. 2023, Doi: 10.32509/Pustakom.V6i2.3287.
- [8] Elsa Prisanda And Rury Febrina, "Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis Aplikasi Sispedal Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance," *Journal Of Governance Innovation*, Vol. 3, No. 2, Pp. 155–171, Sep. 2021, Doi: 10.36636/Jogiv.V3i2.723.
- [9] F. Sulistyowati And C. R. Dibyorin, "Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa," *Jurnal Aspikom*, Vol. 2, No. 1, P. 579, Jul. 2013, Doi: 10.24329/Aspikom.V2i1.34.
- [10] N. K. Nadia, Sazili, Sarmiati, And E. Arif, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 1, Pp. 29–42, Apr. 2022, Doi: 10.30997/Jk.V8i1.5642.
- [11] Aushap Amjad, Naufal Muhammad Lutfi, Nurjaman Muhammad, And Darmawan Ivan, "Pengaruh Penerapan E-Government (Spbe) Melalui Penggunaan Aplikasi 'Sakedap' terhadap Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Smart City (Studi Kasus Di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, Pp. 233243–243, Dec. 2023.
- [12] Aponno Elsina Huberta And Hatubessy Shirley, "Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Di Kecamatan Kairatu Dan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 03, No. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/jpmj/issue/view/50>, Pp. 246–258, Dec. 2020.
- [13] Muhammad Hamdi Muntazir, Toto Kushartono, And Bayu Septiansyah, "Implementasi Sistem Informasi Desa (Sid) Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang," *Jurnal Praxis Idealist*, Vol. 1, No. Vol 1 No 1 (2024): *Praxis Idealist : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2024.
- [14] N. Amiril And I. U. Choiriyah, "Implementation Of E-Government Through The Village Information System (Sid) (Study In Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency)," Aug. 15, 2024. Doi: 10.21070/Ups.6213.
- [15] Laila Istiqhfarah, Irma Irawati Puspaningrum, And Ach. Andiriyanto, "Implementasi Sistem Informasi Desa Dan Kawasan (Sideka) Dalam Percepatan Kemandirian Desa Di Desa Pamolokan Kabupaten Sumenep," *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, Vol. 16, Pp. 97–111, Jun. 2021.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*